

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

- BPK RI. (1983). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46990>
- BPK RI. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/45486/uu-no-10-tahun-1998>
- BPK RI. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- BPK RI. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>
- BPK RI. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *PSAK 117: Kontrak Asuransi*. <https://mobile-api.iaiglobal.or.id/Portal>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan*. <https://mobile-api.iaiglobal.or.id/Portal>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *PSAK 216: Aset Tetap*. <https://mobile-api.iaiglobal.or.id/Portal>
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar Audit (SA) 200*. <https://iapi.or.id/standar-profesional-akuntan-publik/>
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar Audit (SA) 230*. <https://iapi.or.id/standar-profesional-akuntan-publik/>
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar Audit (SA) 320*. <https://iapi.or.id/standar-profesional-akuntan-publik/>
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar Audit (SA) 500*. <https://iapi.or.id/standar-profesional-akuntan-publik/>
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar Audit (SA) 530*. <https://iapi.or.id/standar-profesional-akuntan-publik/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan*

Kegiatan

Orang

Pribadi.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2008/252~PMK.03~2008Per.htm>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Peny.* <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/80-pmk-03-2010>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.* <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/242-pmk-03-2014>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.* <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15693>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.* <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17626>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotong.* <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/82d6ff76-02e8-460e-b603-7bfb24f8a855/59~PMK.03~2022Per.pdf>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sej.* <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/a0aa02e4-837d-4236-baba-7095e2ace61a/2023pmkeuangan048.pdf.pdf>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam.* <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/download/f128868e-3cf6-4596-8407-c34eeca0e7be/2024pmkeuangan131.pdf>

Mahkamah Agung RI. (2026). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>

Buku

Arens, Al. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2023). *Auditing and Assurance Services, Global Edition* (Pearson International Content (ed.)).

Johnson, R. N., & Wiley, L. D. (2021). *Auditing: A Practical Approach with Data Analytics, Enhanced eText*. Wiley Global Education US.

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2024). *Intermediate Accounting IFRS, International Adaptation*. Global Education US.

Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2022). *Financial Accounting with International Financial Reporting Standards (5th Ed)*. Wiley Global Education US.

Jurnal

Farhat, R., & Munari. (2024). Penerapan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Top Schedule terhadap Audit Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 234–243.
<https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/3351/3040/11281>

Website

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai*.
<https://www.pajak.go.id/en/node/34988>

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *PPh Pasal 15*. <https://pajak.go.id/en/node/34296>

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *PPh Pasal 22*. <https://pajak.go.id/en/node/34299>

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *PPh Pasal 23/26*. <https://pajak.go.id/id/pph-pasal-2326>

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *PPh Pasal 4 ayat (2)*.
<https://pajak.go.id/en/node/34297>